

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan isu global yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad dan melibatkan berbagai dimensi seperti politik, agama, ekonomi, dan kemanusiaan. Sejak diterbitkannya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, konflik ini terus berkembang dan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel telah memicu berbagai bentuk solidaritas internasional, salah satunya adalah gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang diluncurkan oleh masyarakat sipil Palestina pada tahun 2005 (Aljazeera, 2017).

Konflik Israel - Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad telah melahirkan berbagai bentuk solidaritas global, salah satunya melalui gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang diluncurkan pada tahun 2005 oleh koalisi masyarakat sipil Palestina. Gerakan ini menyerukan boikot terhadap produk dan institusi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel, divestasi dari perusahaan yang mendukung pendudukan wilayah Palestina, serta penerapan sanksi internasional hingga Israel mematuhi hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina (Barghouti, 2021). Dalam dua dekade terakhir, BDS telah berkembang menjadi gerakan transnasional yang mendapat

dukungan luas dari akademisi, institusi pendidikan, serikat pekerja, organisasi HAM, serta masyarakat sipil lintas negara. Efek konkret dari BDS meliputi pembatalan kontrak perusahaan multinasional seperti G4S, penarikan investasi oleh dana pensiun Belanda, dan divestasi oleh beberapa universitas di Amerika Serikat dan Inggris (BDS Movement, 2020). Survei tahun 2020 juga menunjukkan bahwa 82% warga Palestina aktif memboikot produk Israel apabila tersedia alternatif lokal (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020), serta keberhasilan gerakan ini dalam memenangkan kasus kebebasan berekspresi di Pengadilan HAM Eropa. Meski demikian, respons internasional terhadap BDS sangat beragam. Austria, misalnya, memilih pendekatan yang kontradiktif terhadap nilai-nilai kebebasan sipil dengan secara resmi mengecam BDS sebagai bentuk antisemitisme melalui resolusi parlemen dan kebijakan publik. Sikap ini menimbulkan kontroversi karena Austria dikenal sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia namun justru memberlakukan pembatasan terhadap gerakan protes damai.

Austria, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, menjadi sorotan karena secara resmi mengadopsi kebijakan yang mengecam BDS sebagai bentuk antisemitisme. Pada Februari 2020, Parlemen Austria secara bulat mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa BDS adalah gerakan antisemit, dan menyerukan pemerintah untuk tidak memberikan dukungan, baik berupa fasilitas maupun pendanaan, kepada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan BDS (The Jerusalem Post, 2020). Resolusi ini menyebut bahwa BDS menggunakan pola -

pola antisemitisme dalam narasi dan praktiknya, serta bertujuan untuk mendelegitimasi eksistensi Israel sebagai negara.

Sebelum resolusi parlemen tersebut, tindakan serupa telah dilakukan oleh berbagai institusi di Austria. Misalnya, pada tahun 2016, salah satu bank terbesar di negara tersebut menutup rekening milik BDS Austria setelah mendapat tekanan politik (The Jerusalem Post, 2016). Pada tahun 2017, Aliansi Mahasiswa Nasional Austria (ÖH) mengecam BDS sebagai kampanye antisemitisme (Jewish News, 2017). Tahun berikutnya, Dewan Kota Wina mengesahkan resolusi yang menyatakan BDS sebagai bentuk antisemitisme dan melarang dukungan kota terhadap kegiatan yang berkaitan dengannya (The Jerusalem Post, 2019b). Kota Graz, kota terbesar kedua di Austria, mengikuti langkah ini dengan melarang penggunaan dana dan fasilitas publik untuk kegiatan terkait BDS pada tahun 2019.

Langkah Austria tersebut menimbulkan kontroversi, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik melalui gerakan protes damai. Hal ini menciptakan paradoks, mengingat Austria dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam konstitusinya. Bahkan, Austria menempati peringkat ke 15 dari 162 negara dalam Indeks Kebebasan Manusia 2020 yang menilai kebebasan pribadi, sipil, dan ekonomi (Expatica, 2025).

Dalam teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School, suatu isu dapat dikonstruksi sebagai ancaman oleh aktor negara, yang kemudian membenarkan tindakan luar biasa di luar norma demokrasi, seperti pembatasan

hak - hak sipil (Buzan dkk., 1989). Teori ini relevan karena menjelaskan bagaimana negara menciptakan narasi ancaman untuk membenarkan kebijakan yang membatasi ruang gerak politik warga negara. Dalam hal ini, Austria memosisikan BDS bukan hanya sebagai isu politik atau gerakan sipil, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan keamanan. Proses ini mencerminkan meluasnya praktik sekuritisasi yang tidak lagi terbatas pada isu militer dan terorisme, tetapi juga meliputi ideologi, opini politik, dan gerakan sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena tersebut mencerminkan pergeseran paradigma keamanan dalam negara demokratis. Ancaman tidak lagi dibatasi pada aspek militer, tetapi juga mencakup ideologi, ekspresi politik, dan gerakan sosial. Austria, sebagai negara demokratis yang dikenal netral, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memiliki citra moral kuat pasca - Holocaust, justru mengambil langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Tindakan ini pada dasarnya bertolak belakang dengan komitmen terhadap hak asasi manusia. Alih - alih membela rakyat Palestina yang hak-haknya telah banyak dilanggar, Austria justru mendukung Israel dengan mengecam gerakan BDS yang secara kontroversial disamakan dengan antisemitisme.

Pendekatan represif Austria mencerminkan penggunaan definisi antisemitisme secara politis untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Analisis terhadap kebijakan Austria dalam merespons BDS menjadi krusial untuk

memahami bagaimana kekuasaan diskursif negara dapat membentuk persepsi publik, melegitimasi kebijakan represif, dan berpotensi mengancam prinsip - prinsip dasar demokrasi serta hak - hak individu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu “Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Austria terhadap gerakan BDS, serta strategi dan narasi apa saja yang digunakan untuk membingkai BDS sebagai ancaman?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah strategis yang diambil oleh Austria untuk melakukan sekuritisasi terhadap gerakan BDS, termasuk legislasi dan penggunaan narasi anti - semitisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori sekuritisasi dengan mengeksplorasi bagaimana negara mengonstruksi ancaman non - militer melalui wacana keamanan. Selain itu, studi ini memperkaya kajian hubungan internasional, diplomasi, serta politik global, khususnya dalam memahami respons negara terhadap gerakan sosial global. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi akademisi untuk memahami bagaimana Austria

memandang gerakan BDS sebagai ancaman, dan strategi apa yang mereka gunakan untuk melawannya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara upaya melawan diskriminasi dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi aktivis hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil dalam memahami bagaimana negara membentuk narasi ancaman melalui diskursus sekuritisasi, serta strategi yang dapat digunakan untuk meresponsnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi media dan institusi pendidikan dalam mengembangkan narasi yang lebih kritis dan seimbang terhadap isu - isu sensitif seperti BDS dan antisemitisme. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat membantu organisasi internasional dalam mengevaluasi konsistensi penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia oleh negara-negara Eropa dalam konteks geopolitik yang kompleks.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu untuk menemukan state of the art dari penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian “ *BDS: Nonviolent, Globalized Palestinian Resistance to Israel’s Settler Colonialism and Apartheid* “ oleh Omar Barghouti (2021) menyatakan bahwa BDS adalah gerakan perlawanan non-kekerasan yang berupaya membongkar sistem apartheid Israel melalui tekanan ekonomi, politik, dan akademik. Meskipun Israel telah mengalokasikan sumber daya besar untuk menghentikan gerakan ini, BDS tetap berkembang dan mendapatkan dukungan internasional. Keberhasilan BDS dalam memobilisasi solidaritas global menjadi tantangan bagi strategi sekuritisasi Israel.

Adapun penelitian yang berjudul *"Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Dukungan Austria Terhadap Israel dalam Melawan Aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS)"* oleh Adilah Hasna Khairunnisa (2022) membahas alasan di balik dukungan Austria terhadap Israel dalam menghadapi kampanye BDS yang dianggap sebagai bentuk antisemitisme. Menggunakan teori *Memory, Trauma, and World Politics* dari Duncan Bell, studi ini menjelaskan bahwa dukungan Austria didasari oleh memori kolektif dan trauma sejarah masa lalu, khususnya terkait keterlibatan negara tersebut dalam peristiwa Holocaust selama era Nazi. Austria sebagai negara yang pernah menjadi pelaku dan saksi atas genosida terhadap komunitas Yahudi merasa memiliki tanggung jawab moral dan solidaritas terhadap Israel sebagai negara Yahudi. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah Austria, termasuk resolusi parlemen yang mengecam gerakan BDS. Dukungan ini juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat Austria, termasuk mahasiswa dan komunitas Yahudi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pragmatis, melainkan juga oleh faktor historis dan emosional yang tertanam dalam memori kolektif suatu bangsa.

Selanjutnya ada penelitian yang berjudul “ *The Palestinians, Israel, and BDS: Strategies and Struggles in Wars of Position* “ oleh Ian S. Lustick dan Nathaniel Shils (2022) membandingkan strategi mobilisasi BDS dengan kontra - mobilisasi Israel. Mereka menemukan bahwa Israel telah mencapai konsolidasi strategi dalam melawan BDS, sementara gerakan BDS sendiri masih mengalami fragmentasi. Namun, keduanya melihat bahwa pertempuran utama antara BDS dan Israel berlangsung di Eropa dan Amerika Serikat, yang menjadi medan utama dalam perang narasi dan diplomasi internasional.

Dalam *Routledge Handbook on Israel's Foreign Policy*, Jeremy Pressman dan Carol J. Gray (2024) mengulas secara komprehensif dampak konflik Israel – Palestina terhadap kebijakan luar negeri berbagai negara, termasuk peran aktif negara-negara Eropa dalam menyikapi gerakan BDS (*Boycott, Divestment, Sanctions*). Mereka menggarisbawahi bagaimana Austria, bersama dengan negara - negara seperti Jerman dan Prancis, mengambil langkah formal melalui resolusi parlemen untuk mengecam BDS, yang mereka ditafsirkan sebagai bentuk anti - semitisme kontemporer. Pressman dan Gray menunjukkan bahwa tindakan ini bukan semata bentuk solidaritas terhadap Israel, melainkan mencerminkan pola kebijakan luar negeri yang dikaitkan dengan sejarah trauma kolektif negara tersebut terhadap Holocaust. Austria diposisikan sebagai aktor Eropa yang mengadopsi strategi sekuritisasi terhadap BDS, mengubahnya dari gerakan sipil menjadi ancaman terhadap nilai - nilai nasional dan hubungan bilateral. Kontribusi Pressman dan Gray menjadi sangat penting dalam kerangka penelitian ini karena mereka menawarkan perspektif tentang dinamika diplomasi simbolik

dan bagaimana negara-negara mengintegrasikan narasi keamanan ke dalam kebijakan politik luar negeri mereka terhadap isu - isu pro - Palestina.

Terakhir artikel yang berjudul “ *The Central Political Role of German Left Actors in the Campaign to Replace the IHRA Working Definition of Antisemitism*” oleh Gerald M. Steinberg (2022) menyoroti keterlibatan aktor-aktor politik kiri di Jerman dalam menolak definisi antisemitisme versi IHRA (*International Holocaust Remembrance Alliance*), serta implikasinya terhadap narasi politik di Eropa. Steinberg menunjukkan bahwa definisi IHRA, yang menyamakan beberapa bentuk kritik terhadap Israel dengan antisemitisme, menjadi alat kebijakan yang digunakan oleh negara - negara Eropa, termasuk Austria, untuk membingkai gerakan BDS sebagai ancaman ideologis. Dalam konteks ini, Austria diposisikan sebagai salah satu negara yang tidak hanya mengadopsi definisi IHRA secara resmi, tetapi juga menggunakannya sebagai dasar normatif untuk mengesahkan resolusi parlementer pada tahun 2020 yang menyatakan penolakan terhadap BDS. Artikel ini sangat relevan dengan penelitian mengenai sekuritisasi BDS oleh Austria, karena menggambarkan bagaimana mekanisme diskursif melalui pemaknaan ulang antisemitisme menjadi bagian dari strategi negara dalam mengkonstruksikan ancaman terhadap nilai - nilai nasional. Steinberg dengan jelas menunjukkan bahwa pendekatan Austria bukan sekadar tindakan politik reaktif, tetapi bagian dari tren lebih luas dalam politik Eropa Barat yang menggunakan sejarah, identitas, dan moralitas sebagai dasar untuk tindakan sekuritisasi terhadap gerakan sipil transnasional seperti BDS.

1.5.1 Teori Sekuritisasi Copenhagen School

Teori sekuritisasi dikembangkan oleh Copenhagen School, yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam karya mereka *Security: A New Framework for Analysis* (1998). Teori ini menekankan bahwa keamanan bukanlah sesuatu yang objektif, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan politik melalui bahasa dan narasi. Sekuritisasi merupakan proses di mana suatu isu yang sebelumnya tidak dianggap mengancam dibingkai sedemikian rupa oleh aktor tertentu sehingga dipersepsikan sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan, baik pada tingkat individu maupun negara (Buzan et al., 1998). Proses ini memperluas pemahaman tentang objek keamanan yang tidak hanya terbatas pada aktor negara, tetapi juga mencakup aktor non-negara seperti individu, kelompok, maupun organisasi (Buzan et al., 1998). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketidakamanan (*insecurity*) dapat dirasakan di berbagai tingkat, mulai dari individu hingga sistem internasional (Buzan, 1984: 111).

Selain itu, ketidakamanan tidak hanya berkaitan dengan sektor militer, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan oleh Mazhab Copenhagen memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap konsep keamanan, yang tidak terbatas pada ancaman fisik semata (Buzan, 1997). Dalam buku *Security: A New Framework for Analysis*, Buzan bersama rekan - rekannya menguraikan lima sektor utama dalam kajian keamanan, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kerangka teoritis Copenhagen School, sekuritisasi terdiri atas beberapa elemen utama, yaitu aktor sekuritisasi (*securitizing actors*), ancaman eksistensial (*existential threat*), objek referensial (*referent object*), tindakan sekuritisasi (*act of securitization*), dan audiens (*audience*). Aktor sekuritisasi merupakan pihak yang melakukan pembingkaian isu sebagai ancaman. Mereka tidak selalu merupakan aktor negara, tetapi juga bisa berasal dari kelompok oposisi, individu dengan pengaruh sosial, elit politik, maupun organisasi non-pemerintah (Buzan et al., 1998).

Dalam proses ini, aktor sekuritisasi menyampaikan wacana atau pernyataan yang disebut sebagai *speech act* guna meyakinkan audiens bahwa isu yang diangkat merupakan ancaman nyata yang mengancam keberlangsungan objek referensial. Audiens berperan penting karena mereka adalah pihak yang menjadi target persuasi dari aktor sekuritisasi. Apabila audiens menerima wacana tersebut dan mengakui keberadaan ancaman, maka sekuritisasi dianggap berhasil. Suatu isu dapat dikategorisasi sebagai isu keamanan setelah aktor berhasil melakukan pidato sekuritisasi (Rosyidin, 2020).

Audiens ini bisa berupa pemerintah, masyarakat sipil, opini publik, elit politik, atau aktor lainnya yang memiliki kapasitas untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan sekuritisasi. Dengan menggunakan narasi dalam tindakan tutur tersebut, aktor sekuritisasi berupaya meyakinkan publik bahwa objek referensial benar-benar berada dalam situasi yang mengancam. Peran aktor fungsional adalah untuk memperkuat persepsi ancaman dan tindakan tutur dari aktor sekuritisasi.

Artinya, aktor fungsional bukanlah aktor utama dalam sekuritisasi, melainkan aktor pendukung yang dapat memengaruhi opini publik atau bahkan keputusan politik secara tidak langsung (Wahyudi, 2022).

Lebih lanjut, Copenhagen School menjelaskan bahwa proses sekuritisasi berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu *non - politicized*, *politicized*, dan *securitized* (Buzan et al., 1998). Tahap non-politicized menggambarkan kondisi ketika suatu isu tidak dianggap penting dan belum masuk ke dalam agenda politik. Isu tersebut kemudian memasuki tahap politicized ketika mulai dibahas dalam ruang-ruang politik dan membutuhkan penanganan melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Jika isu tersebut kemudian dibingkai sebagai ancaman yang mendesak dan memerlukan tindakan luar biasa atau darurat, maka ia memasuki tahap securitized. Keberhasilan tindakan sekuritisasi sangat bergantung pada sejauh mana aktor berhasil membangun pemahaman bersama dengan audiens mengenai eksistensi ancaman. Ketika audiens menyetujui bahwa isu tersebut benar - benar mengancam dan membutuhkan penanganan segera, maka isu tersebut akan diprioritaskan dalam agenda keamanan, bahkan dapat membenarkan tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam kondisi normal.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Sekuritisasi

Secara konseptual, sekuritisasi adalah proses konstruksi sosial di mana suatu isu diposisikan sebagai ancaman eksistensial terhadap objek referensial

(negara, masyarakat, identitas, dll.) oleh aktor sekuritisasi, dengan tujuan memperoleh legitimasi untuk mengambil tindakan luar biasa di luar kebijakan normal. Sekuritisasi bukan tentang ancaman yang objektif, tetapi tentang bagaimana suatu isu dikomunikasikan dan diterima sebagai ancaman oleh audiens.

1.6.1.2. Gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*)

BDS adalah gerakan internasional non-kekerasan yang diprakarsai oleh masyarakat sipil Palestina pada tahun 2005, yang menyerukan boikot terhadap produk Israel, divestasi dari perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan sanksi terhadap Israel sampai negara tersebut mematuhi hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina (Barghouti, 2021)

1.6.1.3. Antisemitisme

Dalam konteks ini, antisemitisme dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau permusuhan terhadap orang Yahudi, baik secara individu maupun kolektif, termasuk dalam bentuk stereotip, ujaran kebencian, kekerasan, atau delegitimasi negara Israel secara tidak adil. Namun, konsep ini menjadi problematis ketika digunakan secara politis untuk membungkam kritik terhadap kebijakan Israel.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Sekuritisasi

Sekuritisasi dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai proses di mana pemerintah Austria, melalui tindakan politik, legislasi, dan produksi wacana publik, membingkai gerakan BDS sebagai ancaman terhadap nilai-nilai nasional, identitas kolektif, dan keamanan negara. Proses ini tidak bersifat linier, melainkan bergerak melalui spektrum sekuritisasi sebagaimana dijelaskan oleh teori

Copenhagen School, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *non - politicized*, *politicized*, dan *securitized*. Pada tahap awal (*non - politicized*), isu BDS belum mendapat perhatian signifikan dalam wacana politik Austria dan tidak dipandang sebagai masalah keamanan. Isu ini kemudian mengalami politisasi ketika mulai dibahas dalam ruang publik dan diskursus institusional, terutama terkait dengan tuduhan antisemitisme. Eskalasi terjadi saat pemerintah Austria, khususnya melalui resolusi parlemen tahun 2020, secara resmi menyamakan BDS dengan antisemitisme, yang menandai peralihan isu ini ke tahap *securitized*. Pada titik ini, BDS tidak lagi dilihat semata sebagai gerakan sipil, melainkan dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang membenarkan tindakan luar biasa, seperti pelarangan pendanaan, pembatasan aktivitas organisasi, dan pengendalian ruang ekspresi politik. Keberhasilan sekuritisasi ditunjukkan oleh penerimaan wacana tersebut oleh audiens politik dan publik, yang memberi legitimasi terhadap kebijakan - kebijakan represif tersebut, meskipun ancaman yang dihadirkan bersifat konstruktif, bukan objektif.

1.6.2.3. Gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*)

Gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*) merupakan serangkaian aktivitas kampanye non-kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi internasional yang menyerukan boikot terhadap produk dan institusi Israel, penarikan investasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, serta pemberlakuan sanksi internasional terhadap pemerintah Israel. Aktivitas ini mencakup kampanye publik, kegiatan edukatif, serta berbagai bentuk ekspresi politik yang

menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan penolakan terhadap sistem apartheid serta pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

1.6.2.4. Antisemitisme

Antisemitisme adalah konsep yang digunakan secara politis oleh negara untuk mendiskreditkan gerakan BDS. Hal ini merujuk pada penggunaan definisi antisemitisme versi *International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA) yang menggabungkan kritik terhadap Israel dengan bentuk kebencian terhadap orang Yahudi. Dalam hal ini, antisemitisme dimaknai bukan hanya sebagai bentuk diskriminasi terhadap individu atau komunitas Yahudi, tetapi juga sebagai instrumen wacana yang digunakan untuk membingkai gerakan sosial sebagai ancaman ideologis. Dengan demikian, konstruksi antisemitisme menjadi bagian dari strategi sekuritisasi yang dijalankan oleh Austria dalam membatasi legitimasi politik dan ruang gerak dari gerakan BDS.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka konseptual dan teoritis, penelitian ini berargumen bahwa strategi yang digunakan oleh Austria dalam merespons gerakan BDS merupakan bentuk nyata dari proses sekritisasi sebagaimana dijelaskan oleh Copenhagen School. Austria tidak sekadar melihat BDS sebagai gerakan politik, melainkan membingkainya sebagai ancaman eksistensial terhadap nilai - nilai nasional, stabilitas sosial, dan identitas historis, khususnya terkait dengan memori kolektif tentang Holocaust. Melalui pendekatan legislasi, kampanye diplomatik, dan narasi publik yang mengaitkan BDS dengan antisemitisme, Austria membentuk konstruksi wacana keamanan yang melegitimasi tindakan luar biasa di luar mekanisme demokratis, termasuk pelarangan terhadap organisasi pendukung BDS dan pembatasan ruang gerak ekspresi politik.

Dalam konteks teori sekuritisasi, tindakan ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan bahasa keamanan untuk menggeser isu dari ranah politik terbuka ke ranah darurat yang menjustifikasi pembungkaman. Penelitian ini meyakini bahwa strategi sekuritisasi Austria terhadap BDS tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan nasional semata, melainkan juga mencerminkan upaya negara dalam mengendalikan narasi global seputar konflik Israel – Palestina dan mendefinisikan ulang batas - batas sah dari aktivisme politik dalam sistem demokrasi liberal. Dengan demikian, Austria tampil bukan hanya sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai aktor wacana yang aktif mengkonstruksi persepsi ancaman dalam arena politik internasional.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Austria terhadap gerakan BDS secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi makna, narasi, dan strategi politik yang digunakan oleh aktor negara dalam membingkai gerakan BDS sebagai ancaman. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara lebih mendalam dinamika wacana, konteks historis, dan dimensi ideologis dari kebijakan Austria.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dalam studi ini bersifat non-fisik dan berbasis dokumen, karena data utama yang digunakan berasal dari sumber daring (*online*) dan publikasi resmi. Penelitian dilakukan dengan mengakses sumber - sumber digital seperti arsip resolusi parlemen Austria, dokumen kebijakan kota Wina dan Graz, serta platform berita daring dan publikasi akademik. Situs penelitian meliputi laman resmi institusi pemerintah Austria, serta database jurnal ilmiah dan organisasi internasional yang relevan. Dengan memanfaatkan sumber digital ini, peneliti dapat menjangkau data secara luas dan terkini tanpa batas geografis.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini bukan individu atau kelompok tertentu, melainkan institusi negara Austria sebagai aktor sekuritisasi utama. Dalam konteks ini, yang dimaksud sebagai subjek adalah lembaga-lembaga resmi seperti parlemen Austria, pemerintah federal, serta institusi kota seperti Dewan Kota Wina dan Graz, yang memiliki peran aktif dalam membentuk dan menyampaikan narasi sekuritisasi terhadap BDS. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup pernyataan resmi, kebijakan publik, serta tindakan administratif yang mencerminkan strategi sekuritisasi tersebut.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa dokumen, pernyataan publik, resolusi resmi, laporan media, artikel akademik, dan publikasi institusi pemerintah. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana narasi sekuritisasi dikonstruksi dan disebarluaskan,

serta untuk memahami bagaimana diskursus keamanan digunakan sebagai legitimasi atas kebijakan pembatasan terhadap gerakan BDS.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti resolusi parlemen Austria, pernyataan pemerintah, kebijakan lokal dari kota-kota besar seperti Wina dan Graz, serta wawancara atau transkrip pernyataan publik dari pejabat negara. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel ilmiah, laporan media internasional, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sekuritisasi, anti-semitisme, serta gerakan BDS. Sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data empiris dari arsip digital, media online, situs resmi pemerintah Austria, serta publikasi dari lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk menggali makna tersembunyi dalam narasi sekuritisasi yang dibangun oleh negara terhadap gerakan BDS.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bentuk pertanyaan “bagaimana”, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif dan

akan disusun secara deduktif. Pendekatan deduktif berarti penjelasan akan disusun dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus, serta menekankan adanya hubungan kausal atau sebab-akibat. Mengingat tingkat kompleksitas isu yang dikaji, validitas dan kualitas data yang diperoleh menjadi aspek yang sangat krusial. Untuk itu, peneliti menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: pertama, proses pemilihan dan reduksi data; kedua, penarikan kesimpulan awal; dan ketiga, verifikasi atas kesimpulan tersebut (A. Michael Huberman, 1994). Seluruh tahapan ini akan dianalisis dengan merujuk pada konsep - konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan kredibel dan valid . Data yang digunakan bersumber langsung dari situs pemerintahan Austria. Selain itu Peneliti juga memastikan bahwa data - data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber - sumber yang kredibel, yang dibuktikan melalui pencantuman referensi secara sistematis dalam daftar pustaka.